

MENINGKATKAN MUTU MANAJEMEN MADRASAH (Kajian Minat Masyarakat dan Prinsip Dasar Manajemen Lembaga Pendidikan Islam)

Ali Ridho
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Khairat
Aldo.okfor@gmail.com

Abstrak

Akhir-akhir ini pendidikan madrasah mulai redup eksistensinya, lembaga pendidikan Islam tersebut mejadi kurang diminati masyarakat luas dari segi output dan kualitasnya, sehingga pendidikan madrasah secara umum berada di kelas dua dalam kondisi riil ketika disandingkan dengan lembaga pendidikan secara umum yang ada di Indonesia. Kondisi tersebut terjadi karena madrasah hanya memikirkan bagaimana pendidikan tetap berjalan tanpa memperhatikan faktor-faktor yang bisa menarik minat masyarakat untuk bisa mejadi pilihan utama dalam memproses putra putrinya, selain hal tersebut madrasah sudah hilang jati dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang seharusnya berprinsip sesuai dengan nilai-nilai lembaga pendidikan Islam yang terkandung dalam Kitabullah dan Sunnat Rasulillah SAW sebagai pedoman utama dalam upaya merawat eksistensinya. Dalam teori minat maka hal yang paling perlu diperhatikan adalah Pandangan orang tua dalam memilih madrasah yang mana kalau direngking secara prosentase di atas 50%, maka urutannya adalah berkualitas, unggul baru kemudian kedekatan sekolah/madrasah tersebut dengan rumah. Sedangkan prosentase di bawah 50%, maka urutannya adalah biaya yang murah, disiplin, status madrasah, transportasi mudah dan lingkungan yang mendukung terhadap pengembangan kreatifitas anak. Maka memenuhi segala upaya yang menjadi keinginan masyarakat menjadi kunci timbulnya minat tersebut, namun hal yang paling utama adalah menjaga kualitas pendidikan dengan kontinu dengan model pengelolaan yang tepat dalam hal ini sesuai dengan konsep dasar pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam, sehingga secara objektif masyarakat akan menilai dan merawat eksistensi pendidikan madrasah secara bersama dengan stakeholder madrasah

Kata kunci : Madrasah, Minat, Mutu

Abstrac

Recently, madrasah education has begun to dim its existence, the Islamic educational institutions have become less popular among the public in terms of output and quality, so that Madrasah education generally is in second class in real condition when it is juxtaposed with educational institutions in general in Indonesia. This condition occurs because the Madrasah only think about how education continues to run regardless of the factors that can attract the public to be the main choice in processing the son or his daughter, in addition

madrasah is lost identity as an Islamic educational institution that should be principled in accordance with the values- the value of Islamic educational institutions contained in the Qur'an and Hadith as the main guidance in the effort to maintain its existence. In theory of interest, the most important thing to note is the view of parents in choosing a Madrasah which if it is ranked in percentage above 50%, so the sequence is qualified, excelling, then the closeness to school / madrasah with home. While if we ranked in percentage under 50%, then the sequence is a low cost, discipline, madrasah status, easy transportation and a supportive environment to the development of children creativity. So to fulfill all efforts which become the desire of the community become the key to the emergence of these interests, but the main thing is to maintain the quality of education continuously with the appropriate management model, meaning it is in accordance with the basic concept of management of Islamic Education Institution, so that objectively society will assess and care for the existence of madrasah education together with madrasah stakeholder

Keywords: Madrasah, Interests, Quality

Definisi Madrasah

Asal Muasal dari kata madrasah yaitu dari bahasa Arab yang berarti tempat belajar. Sekolah merupakan padanan kata dari madrasah dalam bahasa Indonesia, menjadi sekolah agama Islam. Perkataan madrasah di Arab sangat berbeda dengan di Indonesia yang mana diorientasikan untuk semua sekolah secara universal, sedangkan di Indonesia madrasah lebih kaprah ditujukan pada sekolah yang struktur kurikulum dasarnya adalah kurikulum yang berbasis agama Islam, turast sebagai pegangan utama. Walaupun Pada sistem madrasah, tidak harus selalu ada pondok, masjid dan pengajian kitab-kitab klasik. Namun menurut Supiana Unsurutama yang harus ada di madrasah adalah pimpinan, guru, siswa, perangkat keras, perangkat lunak dan pengajaran mata pelajaran agama Islam¹

Dalam sejarahnya Madrasah berwujud dan berkembang sebagai lembaga pendidikan Islampada abad ke-5 H atau abad ke 10-11 M. Dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pada saat itu saja pendidikan Islam telah berkembang secara luas dalam berbagai macam ilmu pengetahuan, dengan berbagai macam ilmu aliran atau madzhab dan pemikirannya. Begitupun Pembidangan ilmu pengetahuan, bukan hanya meliputi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan al-Qur`an, al-Hadits, fiqh, ilmu kalam, maupun

¹Supiana, *Sistem Pendidikan Madrasah Unggulan*, (Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI, 2008), 33-34

ilmu tasawuf, tetapi juga bidang-bidang filsafat, astronomi, kedokteran, matematika dan berbagai bidang ilmu alam, vokasi dan kemasyarakatan.

Sementara dalam konteks Indonesia, madrasah merupakan fenomena kekinian yang muncul pada abad 20 M, hal ini disebabkan pada masa awal masuk dan perkembangan agama Islam, masyarakat mayoritas menggunakan Masjid, Langgar-langgar, Surau-surau dan rumah, baru kemudian bermetamorfosis menjadi pondok pesantren sebagai tempat mendalami ilmu pengetahuan. Pada perkembangannya, pesantren dan madrasah merupakan satu kesatuan dari lembaga pendidikan Islam yang bersinergi walaupun pada awalnya ada tarik menarik karena sudah terwujud lembaga pendidikan Islam dan lembaga pendidikan umum (Modern)²

Berdasarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga Menteri tahun 1975 yang ditandatangani bersama pada tanggal 24 Maret 1975, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam setaraf dengan sekolah-sekolah umum yang setingkat. Maka sistem perjenjangan madrasah disusun pada posisi yang sama dengan sekolah. Madrasah Ibtidaiyah (MI) sepadan dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) sepadan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah (MA) sepadan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) sepadan dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)³

Melihat kondisi tersebut, tentunya perlu kita mengapresiasi terhadap sistem lembaga pendidikan Islam di madrasah yang ada di Indonesia. Walau kelemahan yang ada disana sini yang berasal manajemen, sarana prasarananya, SDM dan aturan-aturan yang tidak fleksibel, minimnya partisipasi dari warga madrasah ataupun lainnya. Namun ke khasan karakteristik yang dimiliki madrasah khas dan tidak dimiliki oleh sistem pendidikan lainnya, hal ini jadi salah satu secercah harapan masyarakat milenial untuk menjadi solusi dari persoalan-persoalan kekinian.

1. Komponen Pendidikan Madrasah

Madrasah sebagai lembaga pendidikan tidak lepas dari aktivitas pendidikan (dalam hal ini Pendidikan Islam)⁴. Dalam aktivitas pendidikan menurut Ramayulis ada enam komponen pendidikan, meliputi; a) tujuan; b) Guru/pendidik; c) siswa; d) materi/isi; e)

²Saniri, *Studi Deskriptif Tentang Minat Masyarakat Bawean Terhadap Madrasah*, Semarang, 2012, Tesis

³Muliawan Jasa Unggul, *Pendidikan Islam Integratif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) 164-165

⁴Banyak tokoh Pendidikan mempersepsikan bahwa hakikat dari pendidikan Islam tidak lepas dari hakikat pendidikan umum, walaupun secara landasan teoritis yaitu al-Qur'an dan Hadis, Ali Ridho, "Pendidikan Islam Berwawasan Pluralis (Sebuah Solusi Dari Keberagaman Pemahaman Internal dan antar Agama)" *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 2017, 101.

metode; f) situasi lingkungan. Sedangkan Muhadjir mengungkapkan bahwa komponen pendidikan meliputi; 1) tujuan; 2) subyek didik; 3) pendidik; 4) lingkungan⁵.

Dua pandangan tentang komponen pendidikan sebenarnya sama, tetapi Muhadjir lebih membuat sederhana tetapi secara maksud adalah sama. Jadi komponen pendidikan di madrasah sebagai pijakan dalam pembahasan ini hanya difokuskan pada lima komponen, yaitu; (1) tujuan, (2) guru/pendidik, (3) siswa/peserta didik, (4) isi/ materi dan (5) lingkungan.

2. Tujuan

Merupakan kodrat manusia pada semua tindakannya baik kondisi menyadari atau tidak pasti akan berhaluan pada tujuan yang ingin dicapai. Demikian juga halnya tingkah laku yang berorientasi pada pendidikan. Hal ini didasari dari pandangan normatif maupun praktis. Pandangan tersebut mempunyai implikasi yang berbeda-beda dan menjadi ciri dari sudut pandang tersebut. *Yang pertama* Sebagai ilmu pengetahuan normatif, maka ilmu pendidikan merangkit kaidah-kaidah; nilai/norma, aturan atau ukuran tingkah laku yang hakikatnya diamalkan oleh setiap manusia. *Yang kedua* Sebagai ilmu pengetahuan praktis/aplikatif, yang mana implikasinya adalah pendidik ataupun guru harus menanamkan sistem, nilai/norma, aturan tingkah laku manusia yang didasarkan kepada dasar-dasar falsafah yang dijunjung tinggi oleh lembaga pendidikan (hal ini lembaga pendidikan Islam) dan pendidik disuatu masyarakat.

Kalau dilihat Urutan secara teratur tujuan pendidikan secara umum dapat dilihat dalam kurikulum pendidikan yang dimulai dari: a) Cita-cita pendidikan nasional atau tujuan nasional sesuai dengan maksud dari Pembukaan UUD 1945. b) Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana termaktub dalam Sistem Pendidikan Nasional. c) Tujuan Institusional sebagaimana tertuang disetiap tingkatan pendidikan sekolah/madrasah). d) Tujuan kurikuler yang mana hal ini tertuang Pada tiap-tiap bidang studi/ mata pelajaran atau dalam perkuliahan. Dan e) Tujuan instruksional yang hal ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan intruksional ini tampak keterkaitan dengan apa yang dicapai guru dalam proses pembelajaran dikelas, yang mana tujuan utamanya yaitu upaya pencapaian tujuan nasional yang bersumber dari falsafah hidup dan berlandaskan Pancasila serta Undang Undang Dasar 1945.

⁵Ramayulis, *Pengantar Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 35

Tujuan pendidikan pada madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam lebih menekankan pada aspek Islam sebagai agama dalam tujuan pendidikannya. Sedangkan tujuan dalam pendidikan Islam erat kaitannya dengan tujuan diciptakannya manusia sebagai khalifahtullah di muka bumi ini. Rincian itu menurut Dauly telah diurai banyak pakar pendidikan Islam, misalnya al-Abarasyi mengemukakan untuk membantu manusia dalam pembentukan akhlaq yang karimah/mulia, persiapan untuk kehidupan saat ini yaitu dunia dan kehidupan keak yaitu akhirat, menumbuhkan *ruhul ilmi* (Ruh Ilmiah), menyiapkan peserta didik menjadi peserta didik yang profesional dan persiapan untuk mencari rezeki Allah yang halal.

Al-Syaibany sebagaimana dikutip oleh Saniri merumuskan pembinaan pribadi muslim yang terintegrasi serta berpadu pada perkembangan spiritual, emosional, jasmani, intelektual serta sosial sebagai tujuan individu. Sedangkan Pendidikan Islam dalam hal ini bertujuan dengan hal yang berkaitan dengan bidang spiritual, sosial dan kebudayaan⁶.

3. Siswa/Peserta didik

Dalam teori manajemen (termasuk di dalamnya manajemen pendidikan) dikenal dengan istilah input proses dan output. Dalam pengelolaan pendidikan maka peserta didik merupakan komponen masukan yang selanjutnya dikelola dalam pengelolaan pendidikan, sehingga menjadi manusia yang bermutusebagaimana tujuan pendidikan nasional sbagai outputnya.

Sebagai suatu komponen pendidikan, siswa didik dapat dipandang dari tiga pendekatan dan sudut pandang, yaitu : *pertama*, Pendekatan sosial, siswa adalah bagian dari komponen masyarakat yang dipersiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dari pada sebelumnya. Yang mana peserta didik Sebagai komponen masyarakat berada di tengah-tengah keluarga, masyarakat sekitar, dan bahkan masyarakat yang lebih luas. Hal ini diharap ketika sudah masuk pada kondisi yang menuntutnya untuk bekerja maka Peserta didik tersebut dapat memainkan perannya di tengah-tengah masyarakat.

Pada realitanya lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama di tengah – tengah masyarakat, baru setelahnya lingkungan sekolah/madrasah. Dimana kondisi tersebut, siswa/peserta didik berinteraksi dan bersosialisasi dengan rekan sejawatnya, para guru, dan masyarakat yang berhubungan dengan sekolah maupun madrasah, Dalam posisi seperti inilah nilai dan kultur sosial dapat ditanamkan secara bertahap melalui proses

⁶Saniri, *Studi Deskriptif Tentang...*, 55

pembelajaran dan pengalaman langsung. *Kedua*, Pendekatan Psikologis, siswa didik adalah makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang seiring dengan bertambahnya usia, pengalaman dan pengetahuan dan ini merupakan potensi yang bersifat manusiawi, seperti: hal yang berkaitan dengan jasmaniah, social-emosional-personal, maupun bakat, minat. Potensi tersebut harus selalu dikembangkan melalui proses pendidikan dan pembelajaran di madrasah, sehingga secara psikologis terjadilah perkembangan manusia. Perkembangan mencerminkan perubahan kualitas dan kemampuan pada diri seseorang, yakni adanya perubahan fungsi, efisiensi struktur maupun kapasitas. Perkembangan juga harus komprehensif, seperti perkembangan intelegensia, emosi, spiritual dan sosial.

Ketiga, Pendekatan pedagogis, pendekatan ini memposisikan peserta didik sebagai komponen yang berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sehingga perlu diadakan langkah optimalisasi sistem pendidikan yang komprehensif serta terpadu.

4. Guru/Pendidik

Guru sebagai pendidik di sekolah mengemban tugas dari wali siswa ataupun masyarakat untuk mengimplementasikan sistem pendidikan, hal ini bisa sifatnya secara langsung maupun tidak. Maka dari itu seorang guru sebagai pendidik dituntut untuk memenuhi persyaratan, baik persyaratan yang melekat pada pribadinya maupun persyaratan sebagai konsekuensi jabatan. Persyaratan yang melekat pada pribadinya dilandaskan terhadap aturan yang berkaitan dengan nilai, sikap dan tingkah laku yang diadopsi, kompetensi intelektual dan emosional.

Sedangkan syarat sebagai konsekuensi jabatan atau profesi yaitu berkaitan dengan pengetahuan kemampuan guru dalam menyampaikan ilmu pengetahuan ataupun nilai kepada peserta didiknya dengan metodologi penyampaian yang baik dalam bentuk pembelajaran. Dalam segala proses tersebut maka penyesuaian dengan falsafah pendidikan menjadi sebuah keharusan.

5. Isi/ Materi

Isi ataupun konten pendidikan erat kaitannya dengan tujuan pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas. Yang mana untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik tentang isi/konten maupun bahan yang hal ini disebut sebagai kurikulum dalam pendidikan formal. Yang mana konten dari pendidikan tersebut berkaitan dengan tujuan pendidikan, dan berkaitan dengan insan ideal yang dicita-citakan.

Upaya mencapai insan ideal yang berkembang baik sosial maupun individunya sebagai substansi manusia maka perlu diisi dengan bahan/konten pendidikan. Macam-macam konten pendidikan tersebut terdiri dari berbagai unsur pendidikan, yaitu: Pendidikan agama., sosial, moral, kewarganegaraan, estetis, jasmani, keterampilan maupun yang lainnya.

6. Lingkungan

Lingkungan ketika beracuan pada pendapat bahwa pendidikan adalah sebagai gejala dari kebudayaan, maka pelaksanaan pendidikan tidak hanya sebatas pada sekolah saja atau lebih sempitnya klasikal, namun bisa dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kebudayaan baik yang bersifat kultural ideologis, sosiologis politis, sosiologis anthropologis, sosiologis ekonomis, maupun iklim geografis

Terdapat hubungan yang sangat melekat antara lingkungan dengan manusia, yang mana lingkungan secara pergerakannya ada dua yaitu lingkungan bisa dirubah atau dipengaruhi oleh manusia dan terdapat lingkungan yang tidak bisa berubah sehingga tidak ada peran manusia dalam hal ini. Ada juga lingkungan yang secara sadar dan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu hal tersebut berdasarkan pada kreativitas manusia.

Eksistensi Madrasah

1. Perbedaan Madrasah dengan Sekolah

Supiana dari segi tujuan berpendapat bahwa sekolah dan madrasah memiliki tujuan yang berbeda. Sekolah menanamkan dasar-dasar iptek, sedangkan madrasah menanamkan dasar-dasar imtaq. Sekalipun di sekolah juga ditanamkan tentang imtaq tetapi perbedaannya sangat kecil dibandingkan dengan madrasah, begitu juga sebaliknya walaupun di madrasah ditanamkan tentang iptek tetapi perbedaannya sangat kecil dengan sekolah⁷.

Perbedaan tujuan diatas, sudah tentu akan berpengaruh pada setiap kebijakan pembelajaran di setiap madrasah dan sekolah. Kurikulum sekolah dan madrasah juga berbeda. Pada kurikulum sekolah yang lebih dominan adalah mata pelajaran umum. Sebaliknya di madrasah yang dominan adalah mata pelajaran agama. Terlepas dengan itu semua, aspek lain yang membedakan menurut Supiana adalah kultur atau nuansa islami

⁷Supiana, 2008, *Sistem Pendidikan...*, 49

ditempat belajar. Kultur keagamaan di madrasah sangat menonjol dibandingkan dengan kultur keagamaan di sekolah. Sudah menjadi kebiasaan umum di madrasah guru-guru wanita dan siswi-siswinya menggunakan pakaian panjang yang menutup aurat, term-term Islam dalam pergaulan sehari-hari di madrasah selalu muncul dan menghiasinya, misalnya ucapan salam dan do`a. Madrasah juga tergolong sebagai pendidikan berbasis masyarakat dan pendidikan nilai⁸.

a. Madrasah Sebagai Community Based Education

Berkembangnya madrasah di Indonesia menurut Steenbrink sebagaimana dikutip oleh Saniri merupakan bentuk dari upaya modernisasi pendidikan Islam yang dicetuskan oleh para pembaharu pendidikan Islam di Indonesia, hal ini beracuan pada kaidah :

المحافظة على قديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

Mereka melihat bahwa lembaga pendidikan Islam tradisional tersebut dalam beberapa hal dianggap tidak lagi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman⁹

Dalam Pendidikan dikenal dengan adanya pendidikan berbasis masyarakat, ini merupakan langkah dalam upaya memberikan penyadaran bagi masyarakat untuk terus belajar sepanjang hidupnya untuk bisa memecahkan permasalahan kehidupan dimasa yang akan datang, tentunya dengan kehidupan yang lebih berat. Pendidikan berbasis masyarakat ini merupakan model sebagaimana prinsip sistem demokrasi, yang mana penyelenggaraan pendidikan tertumpu pada prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Maksudnya, pemberdayaan kepada masyarakat perlu secara kontinu dilakukan, sehingga stakeholder bisa memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa mendesain, merencanakan, mengelola, membiayai, mengembangkan, meningkatkan dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara khusus di dalam pendidikan tersebut, untuk dan oleh masyarakat sendiri (inilah sebenarnya yang dinamakan demokrasi pendidikan).

Pada prinsipnya pendidikan yang dilakukan secara demokratis (dirancang, diatur, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan) oleh masyarakat harus berorientasi pada upaya untuk menjawab tantangan dan perkembangan zaman, serta berorientasi

⁸Supiana, 2008, *Sistem Pendidikan.....*, 52

⁹Saniri, 2012, *Studi Deskriptif Tentang Minat Masyarakat Bawean Terhadap Madrasah*, Semarang : Tesis

pada masa depan yang visioner dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab XV tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan yang tertuang pada pasal 54 ayat 1, dan 2, secara gamblang mengamantkan bahwa peran serta masyarakat berupa perorangan atau kelompok dalam mengelola dan mengendalikan lembaga pendidikan bahkan bukan hanya mendefinisikan dari peran tersebut, namun pada ayat 2 juga diperjelas bahwa masyarakat bisa berperan di dalamnya.

Pada pasal 55 ayat 1, 2, 3 dan 4. Semakin diperjelas, bahwa masyarakat diberi kewenangan untuk melaksanakan sistem pendidikan disesuaikan dengan kultur masyarakat, agama atau lainnya. Sedangkan pada ayat dua dijelaskan bahwa konsekuensi dari pelaksanaan sistem pendidikan tersebut maka harus dilengkapi dengan struktur kurikulum, evaluasi dan komponen manajemen pendidikan lainnya. Begitupun dengan sumber dana maka bisa bersumber dari masyarakat secara ansich atau kelompok lainnya yang tidak menyalahi peraturan yang sudah ada. Bahkan pemerintah akan memberikan bantuan untuk keberlangsungan pendidikan tersebut tentunya sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah.¹⁰

Sebagai penegasannya dari undang-undang di atas, maka pendidikan berbasis pada masyarakat adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan menggunakan fasilitas yang ada pada masyarakat itu sendiri ataupun dari sumber lainnya yang tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Keikutsertaan Masyarakat harus benar-benar ditekankan mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan belajar yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi konsep dan praktek pendidikan berbasis pada masyarakat tersebut untuk mewujudkan masyarakat yang berintelektual tinggi, inovatif, mandiri dan mampu berdaya saing di era persaingan global dengan melakukan program belajar yang sesuai kebutuhan tersebut di era milenial.

b. Madrasah Sebagai Pendidikan Nilai

Madrasah tidak cukup hanya menjadi sebuah lembaga yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dengan berbagai proses pembelajaran yang dilakukan di dalamnya, namun bagaimana membangun karakter, membimbing kehidupan dalam

¹⁰ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003

bermasyarakat menjadikan pribadi yang unggul dan masyarakat bermartabat. Madrasah yang berorientasi pada fungsi teologis maka akan paralel dengan kesadaran teologis masyarakat yang didasari oleh kebutuhan untuk internalisasi dan aktualisasi ilmu-ilmu agamanya¹¹.

Madrasah tidak hanya dipahami sebagai lembaga pendidikan yang sederajat dengan sekolah-sekolah lain. Tetapi madrasah harus dipahami sebagai lembaga pendidikan yang memiliki visi dan misi yang sangat strategis dalam membentuk peserta didik religius dan berakhlak Islami. Pendidikan di madrasah bukan saja mengajarkan ilmu sebagai materi, keterampilan sebagai kegiatan, melainkan selalu mengaitkan semuanya itu dengan praktik (amaliyah) yang bermuatan nilai dan moral.

Dalam konteks ini maka antara madrasah dengan pesantren terletak perbedaan yang sangat signifikan yaitu terletak pada sistem pendidikannya. Madrasah menggunakan sistem pendidikan formal yang diwujudkan dengan penggunaan struktur Kurikulum Nasional (Kurnas), penjadwalan mata pelajaran serta ujian yang sudah tersusun, sarana dan prasana serta pendukung lainnya seperti umumnya sekolah model Barat.

Sedangkan pesantren menganut sistem non-formal yang mana sistem pelaksanaan pendidikan diwujudkan dengan penerapan kurikulum berbasis lokal, penjadwalan pelajaran tidak seragam, dalam proses penilaian untuk mengukur tingkat kemampuan siswa tidak selalu harus menggunakan ujian namun dengan hal semisal dengan hafalan atau lainnya.

Dalam upaya menggabungkan antara dua sistem pendidikan yang berbeda yaitu pendidikan umum dan pesantren, maka pendidikan madrasah menjadi solusi, karena menganut sistem yang fleksibel serta mengakomodir kedua sistem tersebut.

Oleh karena itu, pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000, tentang kewenangan pemerintah daerah, membawa peluang dan konsekuensi yang signifikan dalam pengelolaan pendidikan termasuk di dalamnya pengelolaan madrasah. Karena otami menuut Prof Vietzal Rivai merupakan kunci dari majunya sistem tata kelola lembaga pendidikan¹²

¹¹Saniri, 2012, *Studi Deskriptif Tentang Minat ...*, 15

¹²Rivai, Vietzal. *Education Manajemen...*, 254

Kebijakan ini merupakan salah satu langkah pemberdayaan madrasah dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara kontinu, terarah dan komprehensif. Walaupun dalam kenyataannya UU otonomi daerah sama sekali tidak menghapus kewenangan pemerintah pusat dalam mengelola pendidikan dalam setiap satuan pendidikan termasuk madrasah, maka seharusnya madrasah menangkap semangat non sentralistik pendidikan dengan upaya melakukan pemberdayaan segenap potensi yang ada baik manajemen, kurikulum, Sumber Daya manusia, pengaturan dan dalam pengelolaannya secara komprehensif.

Madrasah harus selalu berinovasi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikannya, salah satunya dengan peningkatan mutu kurikulumnya. Muatan kurikulum selain kurikulum yang sifatnya wajib maka ada peluang bagi madrasah untuk memasukkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan yang ada di madrasah, tentunya harus melalui kajian yang matang, sehingga apa yang dijalankan di madrasah tersebut (dalam hal ini kurikulum) sudah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat.¹³

2. Minat Masyarakat terhadap Madrasah

a. Minat masyarakat

Minat dan masyarakat, merupakan dua kata yang mempunyai makna beda. Untuk mendapatkan makna dari dua kata ini harus diterjemahkan terlebih dahulu kata perkata. Koentjaraningrat¹⁴ mendefinisikan masyarakat sebagai satu kesatuan yang terikat oleh sebuah sistem yang berkembang baik berupa adat istiadat, norma, nilai ataupun aturan-aturan yang didalam secara kontinu melakukan interaksi antar sesama. Definisi ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat dipahami sebagai sistem sosial yang di dalamnya terdapat unit-unit yang saling berhubungan untuk memberikan sebuah aksi dan reaksi terhadap setiap peristiwa, sehingga masyarakat sering dilihat sebagai kekuatan impersonal yang mempengaruhi, mengekang dan menentukan tingkah laku anggota-anggotanya¹⁵.

Kemudian istilah minat seringkali didefinisikan sama dengan bakat, motif dan motivasi. Tetapi minat bukanlah bakat, motif dan motivasi. Minat secara konsepsi

¹³Saniri, 2012, *Studi Deskriptif Tentang Minat...*, 54

¹⁴Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 146-147

¹⁵Khozin, Wahid, *Masyarakat dan Eksistensi Madrasah Diniyah*, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kemenag RI, 2006).

merupakan kajian tersendiri yang memiliki definisi, ruang lingkup, indikator, jenis dan faktor. Menurut Crow¹⁶ minat sangat erat kaitannya dengan daya magnetik yang bisa mendorong seseorang untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang, benda atau juga bisa diorientasikan sebagai pengalaman efektif yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia itu sendiri. Hurlock¹⁷ mengartikan minat sebagai sumber motivasi yang membuat orang terdorong untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Pandangan Crow diatas lebih menitik beratkan minat pada daya gerak, sedangkan Hurlock memandang minat sebagai sumber motivasi. Jika dianalisis antara daya gerak dan sumber motivasi, keduanya memiliki kesamaan faktor yang datang dari dalam diri individu dan jelas akan mempengaruhi sikap dan keputusan individu tersebut terhadap objek yang disenanginya.

Tetapi bagi Singer minat merupakan sesuatu yang yang muncul dari pengalaman perasaan atau yang disebut sebagai sebuah kesadaran dan berhubungan dengan perhatian sebagai sebuah objek dalam bentuk tindakan¹⁸. Berbeda dengan Walgito yang mengatakan bahwa minat adalah suatu kondisi dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai dengan keinginan untuk mengetahui dan memperhatikan maupun membuktikan langkah selanjutnya. Bagi Singer dan Walgito, minat hanya pengalaman perasaan dari setiap individu yang diwujudkan dengan perilaku-perilaku individu yang bersangkutan sehingga daya gerak ataupun sumber motivasi tidak berperan besar pada perilaku individu tanpa ada pengalaman perasaan sebelumnya¹⁹. Sementara itu, Gunarso memandang minat adalah sesuatu yang sifatnya pribadi dan erat kaitannya dengan sikap. Dari Minat dan sikap ini menjadi dasar dari munculnya prasangka, sehingga dalam pengambilan keputusan dibutuhkan minat. dan minatlah yang dapat menyebabkan seseorang semangat dalam berusaha mewujudkan apa yang menarik minatnya²⁰.

Kemudian dari penafsiran tentang konsep yang dikemukakan di atas, minat masyarakat dapat disimpulkan sebagai salah satu aspek psikologis individu dalam masyarakat yang mempunyai dampak signifikan pada sikapnya serta perilaku dari setiap

¹⁶Crow, Alice, and Lester D. Crow, *Educational Psychology*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1989), 302-303

¹⁷Hurlock, Elizabeth B, *Child Development*, diterjemah oleh Med. Meitasari Tjandrasa dalam, *Perkembangan Anak*, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, 1978), 114

¹⁸Singer, Kurt, *Verhindert Die Schule Das Lernen*, diterjemah oleh Bergman Sitorus, *Membina Hasrat Belajar Di Sekolah*, (Bandung: Remaja Karya, 1973), 78

¹⁹Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Andi, 2002), 38

²⁰Gunarso. *Meningkatkan Minat Belajar Anak*, (Jakarta: LPTK dan ISPI. 1995), 68

individu dalam masyarakat, sehingga minat yang terbangun dari perasaan dan pengalaman tentang obyek dapat menjadi sumber motivasi yang akan mengarahkan individu dalam masyarakat melakukan apa yang menjadi tujuan dimaksud. Dengan demikian minat mengandung unsur-unsur sebagai berikut; *pertama* minat adalah suatu gejala psikologis; *kedua* pemusatan perhatian, perasaan dan pikiran dari subyek karena tertarik; *tiga* terdapat perasaan rasa suka terhadap obyek yang menjadi objek; *empat* adanya keinginan atau kecenderungan pada diri subyek untuk melakukan kegiatan guna mencapai tujuan. Pendapat ini sejalan dengan apa yang juga diungkapkan oleh Anastasi bahwa hakikat dan kekuatan minat dan sikap²¹ adalah merupakan aspek yang sangat penting bagi kepribadian seseorang, di mana karakteristik ini secara materil berpengaruh terhadap prestasi pendidikannya, pekerjaannya, interaksi antar individu, kesenangan yang didapatkan seseorang dari aktivitas waktu kosong, dan kondisi kehidupan sehari-hari²².

Minat terletak pada ranah afektif, dan untuk diklasifikasikan sebagai ranah afektif, pemikiran atau perilaku harus memiliki dua kriteria; *pertama*, pelibatan emosi dan perasaan dalam perilaku seseorang. *Kedua*, seseorang dalam berperilaku harus mempunyai tipikal yang menjadi identitasnya. Selain hal tersebut intensitas, arah dan target juga masuk kriteria ini yaitu ranah afektif. Intensitas ini menunjukkan derajat atau kekuatan dari perasaan. Sedangkan arah perasaan berkaitan dengan orientasi positif atau negatif yang menunjukkan apakah perasaan itu baik atau buruk. Beda ketika intensitas dan arah perasaan ditinjau secara bersama-sama, maka karakteristik afektif berada dalam suatu skala yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Krathwohl dalam perspektif taksonomis, maka ranah afektif terdiri atas lima tingkatan yaitu: tingkat penerimaannya, tingkat responsibilitinya, tingkat penghargaannya, tingkat pengorganisasiannya, dan tingkat kepribadiannya. Dari kelima tingkatan tersebut, ruang lingkup atau yang menjadi kajian minat menurut Krathwohl hanya meliputi tiga tingkatan saja yaitu pada penerimaan, tanggapan, dan penghargaan, sebagaimana tabel pembagiannya sebagai berikut²³:

²¹Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 3.

²²Anastasi, Anne, *Psychological Testing*, diterjemah oleh Robertus Hariono S. Imam, *Tes Psikologi*, Jilid 2, (Jakarta : Prenhalindo 1977), 426

²³Krathwohl, David R, et.al, *Taxonomy of Educational Objectives*, (London: Longmans, 1956), 37

Tabel. 2
Ruang Lingkup Minat dari Krathwohl

Penerimaan	Kesadaran								1
	Kesediaan Untuk Menerima								
	Kontrol atau perhatian							2	
Respon	Akuisisi dalam merespons								
	Kesediaan untuk merespons	5	4	3					
	Kepuasan dalam merespons								
Penilaian	Penerimaan nilai								
	Preferensi untuk sebuah nilai								
	Komitmen (keyakinan)								
Pengorganisa sian	Konseptualisasi sebuah nilai								
	Organisasi sistem nilai								
Karakterisasi dengan nilai Kompleks	Aturan Umum								
	Karakterisasi								

Keterangan: 1) Interest/ Minat; 2) Appreciation/ Apreasiasi; 3) Attitudes/ Sikap; 4) Value/ Nilai; 5) Adjustment/ Penyesuaian diri.

Dari tabel di atas, jelas kiranya bahwa *interest* atau minat hanya meliputi tiga tahapan saja, yaitu; (1) *Receiving* (penerimaan terhadap obyek), diantaranya meliputi kesadaran pada obyek, kemauan menerima pada obyek dan perhatian terhadap obyek; (2) *Responding* (tanggapan terhadap obyek), diantaranya meliputi pengakuan terhadap obyek, respon terhadap obyek, dan kepuasan terhadap obyek; (3) *Valuing* (penghargaan terhadap obyek), diantaranya meliputi penerimaan sistem nilai yang ditimbulkan obyek dan panutan sistem nilai yang ditimbulkan oleh obyek.

b. Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat

Minat sebagai sumber motivasi yang membuat orang terdorong untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Minat jugamenunjukkan adanya pengertian subyek terhadap obyek yang menjadi sasaran yang disorong dari perasaan tertariknya kepada obyek, yang mana Kecendrungan yang ditimbulkan oleh individu suatu masyarakat karena dipengaruhi oleh faktor kebutuhan dari individu itu sendiri.

Terdapat suatu pendekatan yang paling populer pada konsep kebutuhan yaitu yang dikembangkan oleh Abraham Maslow (1943). yaitu dikenal dengan Teori holistik, yang mana dinamika ini mengasumsikan bahwa pemenuhan kebutuhan merupakan prinsip penting yang mendasari perkembangan individu dari suatu masyarakat.

Menurut teori kebutuhan menurut Maslow (1943) terdapat lima tingkatan kebutuhan dari kebutuhan manusia yang paling rendah sampai pada kebutuhan manusia yang paling tinggi, yaitu; (1) Kebutuhan fisiologikal (*Fisiologikal Needs*); (2) Kebutuhan keselamatan (*Safety Needs, Security Needs*); (3) Kebutuhan berkelompok (*Social Needs, Love Needs, Belonging Needs, Affection Needs*); (4) Kebutuhan penghargaan (*Esteem Needs, Egoistic Needs*); (5) Kebutuhan aktualisasi diri (*Self actualization Needs, Self realization Needs, Self fulfillment Needs, Self expression Needs*)²⁴.

Teori hirarki kebutuhan Maslow ini, menurut Usman mengandung kelemahan. Pertama, sulitnya untuk membuktikan bahwa kebutuhan manusia itu mengikuti suatu hirarki. Kedua, setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, terutama pada tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. ketiga, munculnya kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi bukan karena disebabkan telah terpenuhinya kebutuhan yang lebih rendah, namun karena meningkatnya karir atau posisi atau tingkat kesejahteraan seseorang. Keempat, kebutuhan-kebutuhan itu mempunyai sifat yang fleksibel sehingga sulit menetapkan suatu ukuran yang memuaskan bagi semua pihak. Tetapi teori hirarki kebutuhan Maslow sangat berguna untuk menjelaskan tentang minat individu suatu masyarakat pada objek yang diminatinya

Menurut teori Alderfer (1972) manusia memiliki kebutuhan yang disingkat dengan ERG, yaitu *Existence, Relatedness, dan Growth*. Manusia menurut Alderfer, pada hakikatnya ingin dihargai dan diakui keberadaannya, keinginan diundang dan dilibatkan (eksistensi). Disamping itu manusia sebagai makhluk sosial ingin berhubungan atau bergaul dengan manusia lainnya (relasi). Manusia juga ingin selalu meningkatkan taraf hidupnya menuju kesempurnaan dengan maksud ingin selalu berkembang. Tegasnya, bahwa minat masyarakat terhadap suatu objek atau aktivitas

²⁴Achmad Rifa'i, *Psikologi Pendidikan*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2010), 164

dapat dipengaruhi atau ditimbulkan dari beberapa faktor eksternal individu dalam masyarakat itu sendiri²⁵..

Tetapi bukan berarti faktor internal individu dalam masyarakat tidak berpengaruh terhadap minat. Menurut Crow faktor dorongan dari dalam atau *the factor of inner urge* juga berpengaruh, artinya minat timbul karena pengaruh dari dalam untuk memenuhi semua kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Begitu juga dengan faktor emosi atau *the factor of emotional*²⁶, artinya karena pengaruh emosi maka minat akan timbul pada orang yang bersangkutan. Dampaknya maka seseorang yang melakukan sesuatu dengan perasaan yang senang, maka akan mendapatkan hasil yang memuaskan dan bahkan bisa sekaligus memperbesar minatnya terhadap suatu kegiatan tersebut. Selanjutnya faktor motif dalam lingkungan social atau *the factor of social motive*, artinya minat timbul karena pengaruh kebutuhan dalam masyarakat sekitar dilingkungan hidupnya bersama-sama orang lain. Dan Hurdlock menambahkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap pendidikan, antara lain; pengalaman yang sedari dini dikembangkan di sekolah, orang tua yang selalu memberikan pengaruh, sikap saudara sekandung, sikap teman seangkatan dan sebaya, keberhasilan dibidang akademik, sikap atas pekerjaan, hubungan dan komunikasi guru dan murid, serta suasana emosional di sekolah²⁷.

Faktor-faktor tersebut merupakan konsep umum, karena menurut Dwiningrum minat masyarakat terhadap sekolah/ madrasah tidak dipisahkan dari keterlibatan orang tua dalam memilih didasari pada pandangan obyektif dan subyektif terhadap sekolah/ madrasah bersangkutan. Pandangan tersebut memberikan eksistensi dan pengakuan masyarakat terhadap sekolah/ madrasah. Secara obyektif, minat tersebut berdasarkan penilaian pada kondisi formal yang diakui keberadaannya. Secara subyektif, minat tersebut berdasarkan pada pengalaman personal dan informasi tentang sekolah/ madrasah²⁸:

Pandangan orang tua dalam memilih sekolah/ madrasah jika direnking secara prosentase di atas 50%, maka urutannya adalah berkualitas, unggul dan dekat rumah.

²⁵Usman, Husaini, *Manajemen Teori*, 259

²⁶Crow, Alice, and Lester D. Crow, 1989, *Educational Psychology*..., 302-308

²⁷Hurlock, Elizabeth B, *Child Development*, diterjemah oleh Med. Meitasari Tjandrasa, *Perkembangan Anak*, Jilid 2, Jakarta: Erlangga, 1978), 139

²⁸Dwiningrum, Siti Irene Astuti, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Suatu Kajian Teoritis Emperik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 230-233

Dan secara prosentase di bawah 50%, maka urutannya adalah biaya murah, disiplin, status negeri, transportasi mudah lingkungan mendukung, dan keinginan anak.

Lebih lanjut, menurut Dwiningrum setiap lembaga pendidikan mempunyai kekuatan untuk mendorong masyarakat membuat sebuah keputusan penting yang berkecenderungan sama bahwa faktor lembaga pendidikan dimaksud berkualitas atau tidak berkualitas. Faktor sekolah/ madrasah yang dipilih orang tua direngking secara prosentase di atas 50%, maka urutannya adalah SBI, fasilitas lengkap, disiplin, dan berprestasi. Dan secara prosentase di bawah 50%, maka urutannya adalah kepala sekolah dan guru yang professional, nuansa belajar kondusif dan lingkungan strategis.

Uraian tersebut, secara tidak langsung menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut tidak timbul begitu saja, ada proses yang terjadi, sebagaimana proses yang terjadi dalam teori isi yang memusatkan perhatiannya pada sebuah pertanyaan, “apa yang menyebabkan perilaku tersebut terjadi dan berhenti”. Maka jawabannya terpusat pada; *pertama* keinginan, kebutuhan atau dorongan yang memacu untuk melakukan kegiatan tertentu; *kedua* hubungan dengan faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan mereka melakukan kegiatan

Maka memenuhi segala upaya yang menjadi keinginan masyarakat menjadi kunci timbulnya minat tersebut, namun hal yang paling utama adalah menjaga kualitas pendidikan dengan kontinu dengan model pengelolaan yang tepat, sehingga secara objektif masyarakat akan menilai dan merawat eksistensi pendidikan madrasah yang kita bangun.

3. Merawat eksistensi pendidikan madrasah

Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh madrasah dalam upaya merawat eksistensinya adalah kembali pada prinsip-prinsip manajemen lembaga pendidikan Islam yang ideal dan dinamis. Prinsip manajemen pendidikan ideal dan dinamis tersebut secara pasti akan kembali kepada sumber aslinya, yaitu Islam. Di era kekinian banyak dari sebagian besar golongan umat Islam sendiri menanggalkan sumber asli tersebut yang sebenarnya sangat sederhana dan terlalu mengagungkan teori konvensional yang terkesan mewah. Padahal seandainya umat Islam konsisten dengan prinsip tersebut maka lembaga pendidikan Islam (dalam hal ini Madrasah) akan terus berkembang maju kokoh dan dinamis. Dalam Islam kita dapat menjumpai beberapa prinsip pendidikan sebagai berikut.

- a. Kewajiban untuk Belajar. Dalam al-Qur'an maupun hadis kita bisa temukan terkait kewajiban belajar tersebut. Yang mana kewajiban untuk terus belajar orientasinya agar setiap orang meningkatkan kemampuan dirinyadibidang pengembangan wawasan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, spiritual, dan sosial yang mana hal itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Faktanya prinsip ini tidak secara merata dimiliki oleh umat Islam, hanya mereka yang sadar akan pentingnya pendidikan yang menggap hal ini wajib namun bagi sebagian besar pendidikan hanya pada batasan jenjang tertentu. Lembaga pendidikan harus berani membuat terobosan ini sehingga hadist "tholabul 'ilmi faridhatun 'ala kuli muslimin wa muslimatin minal mahdi ila al-lahdi betul-betul dijalankan, maka secara otomatis SDM umat Islam akan unggul. Hadis ini mengajakan juga tentang prinsip pendidikan sepanjang hayat atau yang dikenal dengan *Long Life Education* dalam arti menekankan, hal ini msetiap orang dapat terus belajar dan mengembangkan kemampuan dirinya dirinya sepanjang hidup.

- b. Pendidikan untuk semua (*Education for All*) bahwa dalam prinsip ini menuntut adanya kesamaan hak, adil dalam perlakuan, tidak diskriminasi untuk mendapatkan pendidikan. Islam tidak pernah kenal dengan istilah diskriminasi dalam pendidikan sehingga ketika prinsip ini dijalankan maka ada harapan besar Sumber Daya Manusia akan melimpah ruah yang secara otomatis lembaga pendidikan Islam akan terus maju seiring dengan majunya SDM tersebut.
- c. Pendidikan Berwawasan Global dan inklusif, bahwa dalam prinsip ini ilmu pengetahuan yang dipelajari bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan yang ada didalam negeri sendiri, melainkan juga ilmu yang secara luas ada dinegera-negara majusperti Amerika, Inggris, India dan negara-negara maju lainnya. Tidak ada batasan tentang pemikiran pendidikan yang bersifat locally sehingga peradaban muncul dari lembaga pendidikan islam ini dan menjadi pusat inspirasi dari lembaga-lembaga lainnya. Jika hal ini terjadi lembaga pendidikan Islam harus siap menjadi the fist class. Berwawasan global juga dalam arti eksplorasi pengetahuan-pengetahuan yang bersifat umum dan dianalisis menjadi sebuah teori baru yang bisa diterapkan dilingkungannya masing-masing.
- d. Pendidikan Integralistik dan Seimbang, prinsip ini lebi pada upaya memadukan antara pendidikan ilmu agama dan pendidikan umum. Fanatisme terhadap satu fan ilmu dan menafikan yag lainnya sama hal menafikan ilmu Allah secara keseluruhan, Allah

menurunkan ilmu ke muka bumi tanpa mendikotomikan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, semua ada keterkaitan dengan kehidupan manusia. Bukankah Allah menantang hambanya untuk berfikir tentang langit, bumi, unta dan sebagainya! Itu semua tidak cukup diketahui jawaban yang terkandung di dalamnya dengan hanya mengandalkan Ilmu Fikih misalnya.

- e. Pendidikan harus sesuai dengan bakat peserta didik, prinsip ini berkaitan dengan bagaimana merencanakan program dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan bakat, minat dan kecenderungan peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Output dari hal ini akan menciptakan Sumber Daya Manusia yang benar-benar kompetibel dan senang akan kemampuannya.

Ada sebuah ungkapan menarik dalam prinsip ini “lebih baik tau banyak dari hal yang sedikit, dari pada tau sedikit dari hal yang banyak”. Prinsip ini akan mengarahkan manusia pada sebuah pengetahuan yang mendalam, pakar dalam satu bidang dan bisa menghasilkan manfaat yang banyak bagi semua orang.

- f. Pendidikan harus Menyenangkan dan Menggembirakan. Prinsip pendidikan ini berkaitan dengan upaya memberikan layanan yang maksimal dan manusiawi, dalam arti pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, selalu memberikan jalan keluar dan problem solving, menggembirakan, mencerahkan, menggairahkan dan memuaskan.

Lembaga pendidikan tidak lagi menjadi tempat yang angker/menakutkan bagi siswa untuk mengembangkan kreatifitas dan pengetahuannya, malah menjadi tempat idaman dan mimpi bagi anak didik untuk terus menggali potensi dirinya.

- g. Pendidikan harus Berbasis pada Riserch dan Rencana. Prinsip ini dimaksudkan bagaimana pendidikan yang dilaksanakan dan dikembangkan harus berdasarkan hasil riserch dan kajian yang benar-benar eksklusif, bukan berdasarkan dugaan.

Ada ungkapan yang sering didengar dengan kondisi seperti ini, yaitu NATO (*No Action Talk Only*), lembaga pendidikan sangat tidak relevan ketika apa yang harusnya menjadi ruh malah terabaikan dan malah kadang tergadaikan.

- h. Pendidikan Unggul dan Profesional, prinsip pendidikan ini menjunjung tinggi dan mengutamakan kualitas lulusan yang unggul sehingga harus dibantu oleh berbagai komponen pendidikan lainnya yang unggul pula. Sumber Daya Manusia menjadi kunci bagaimana membangun prinsip ini, sehingga proses yang diterapkan semua berhalusn pada kajian analisis perencanaan matang untuk membangun peradaban dalam hal ini

lulusan lembaga pendidikan yang kompeten dan menjadi bibit Sumber Daya Manusia unggul.

Dari delapan prinsip ini yang kesemuanya bermuara pada Al-Qur'an dan Hadis maka penerapannya secara maksimal menjadi sebuah keniscayaan untuk membangun Lembaga Pendidikan Islam khususnya madrasah menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Kedelapan prinsip ini juga tidak lepas dari peran serta pimpinan lembaga pendidikan Islam tersebut yang secara konsisten melaksanakan delapan prinsip, yang mana seorang pemimpin harus mampu menggerakkan pelaksanaan pendidikan Islam (madrasah) untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan landasan al-Qur'an dan Hadist²⁹

²⁹Ali Ridho, "ESQ dalam Kepemimpinan Pendidikan" *Fikrotuna*, Vol. 04, No, 02. (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Juli. 2016), 3

Kesimpulan

Substansi dari manajemen adalah kehidupan yang dinamis dari masa kemasa, selalu ada langkah-langkah solusi dalam upaya mengembangkan lembaga dalam hal ini pendidikan Madrasah, yang mana selama ini cenderung terdiskreditkan baik dari kebijakan yang berasal dari pemerintah maupun minat masyarakat yang sudah mulai memudar.

Kondisi tersebut sangat tidak menguntungkan terhadap eksistensi madrasah yang bagi sebagian orang menempatkan pada posisi nomor dua setelah pendidikan umum. Pendidikan madrasah harus cepat merespon apa yang menjadi keinginan kuat dari masyarakat, karena partisipasi merupakan salah satu upaya penerepan model manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Salah satu upaya merespon harapan masyarakat adalah membenahi enam komponen pendidikan, meliputi; 1) tujuan; 2) pendidik; 3) siswa; 4) isi/ materi; 5) metode; 6) situasi lingkungan. Pembenahan terhadap komponen ini berdampak pada output yang baik dan menepis anggapan negatif dari masyarakat.

Selain hal tersebut, upaya kembali pada prinsip-prinsip lembaga pendidikan Islam menjadi kunci dari pengembangan madrasah menjadi yang lebih baik, yaitu Prinsip Wajib Belajar adalah Prinsip Pendidikan untuk semua, Prinsip Pendidikan Berwawasan inklusif dan Global, Prinsip Pendidikan berkeeseimbangan atau Integralistik, Pendidikan yang sesuai dengan keahliannya, Pendidikan Menyenangkan, Pendidikan yang Berbasis pada Riserch dan Rencana serta Pendidikan Unggul dan Profesional

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasi, Anne, 1977, *Psychological Testing*, diterjemah oleh Robertus Hariono S. Imam dalam *Tes Psikologi*, Jilid 2, Jakarta : Prenhalindo
- Crow, Alice, and Lester D. Crow, 1989, *Educational Psychology*, diterjemah oleh Abd. Rachman Abror dalam *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti, 2011, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Suatu Kajian Teoritis Emperik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunarso. 1995. *Meningkatkan Minat Belajar Anak*. Jakarta: LPTK dan ISPI
- Hurlock, Elizabeth B, 1978, *Child Development*, diterjemah oleh Med. Meitasari Tjandrasa dalam, *Perkembangan Anak*, Jilid 2, Jakarta: Erlangga
- Krathwohl, David R, et.al, 1956, *Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goals*, Handbook II: Affective Domain, London: Longmans
- Koentjaraningrat, 2002, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Khozin, Wahid, Masyarakat dan Eksistensi Madrasah Diniyah, *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan Edukasi*, Volume 4, Nomor 4, Oktober-Desember 2006, Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kemenag RI.
- Muliawan, Jasa Unggul, 2005, *Pendidikan Islam Integratif, Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramayulis, 2002, *Pengantar Psikologi Agama*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Rifa'i, Achmad, 2010, *Psikologi Pendidikan*, Semarang: Universitas Negeri Semarang Press,
- Ridho, Ali. Pendidikan Islam Berwawasan Pluralis (Sebuah Solusi Dari Keberagaman Pemahaman Internal dan antar Agama). *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 2017.
- Ridho, Ali. ESQ Dalam Kepemimpinan Pendidikan. *Fikrotuna*, 2017.
- Saniri, 2012, *Studi Deskriptif Tentang Minat Masyarakat Bawean Terhadap Madrasah*, Semarang : Tesis
- Supiana, 2008, *Sistem Pendidikan Madrasah Unggulan Di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Tangerang, Madrasah Aliyah Negeri Bandung Dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandung Dan Madrasah Aliyah Negeri Darussalam Ciamis*, Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI.

Singer, Kurt, 1973, *Verhindert Die Schule Das Lernen*, diterjemah oleh Bergman Sitorus, *Membina Hasrat Belajar Di Sekolah*, Bandung: Remaja Karya.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003

Usman, Husaini, 2009, *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Walgito, Bimo, 2002, *Psikologi Sosial, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Andi.